

**DINAMIKA VISIBILITAS KONFLIK
PADA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI
TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE**

**DYNAMICS OF CONFLICT VISIBILITY IN THE CONSERVATION
AREA OF TAKA BONERATE NATIONAL PARK**

YASRI TAHIR



**PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

**DINAMIKA VISIBILITAS KONFLIK
PADA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI
TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

YASRI TAHIR
NIM M012211012

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**DINAMIKA VISIBILITAS KONFLIK
PADA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI
TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE**

YASRI TAHIR
NIM M012211012

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Magister Program Studi Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin pada tanggal 20 Februari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing utama,



Prof. Dr. forest. Muhammad Alif KS., S. Hut., M. Si
Nip. 19790831200812 1 002

Pembimbing pendamping,



Dr. Asrianny, S. Hut., M. Si
Nip.197605142008012009

**Ketua Program Studi S2
Ilmu Kehutanan,**



Mukrimin, S.Hut., M.P., Ph.D
Nip. 197802092008121001

**Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin,**



Dr. A. Mujetahid M, S.Hut., M.P
Nip. 19690208 199702 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Dinamika Visibilitas Konflik Pada Kawasan Konservasi Perairan di Taman Nasional Taka Bonerate" adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing (Prof. Dr. forest. Muhammad Alif KS., S. Hut., M. Si sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Asrianny, S. Hut., M. Si sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal sebagai artikel.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 Februari 2024




Yasti Tahir

NIM M012211012

PRAKATA

Segala puji hanya bagi ALLAH SWT yang telah memberikan petunjuk, rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan tesis ini :

1. Komisi pembimbing Prof. Dr. forest. Muhammad Alif KS., S. Hut., M. Si dan Dr. Asrianny, S. Hut., M. Si yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam melaksanakan penelitian dan penulisan tesis.
2. Komisi penguji Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M. Sc, Prof. Dr. Ir. Yusran, S. Hut., M. Si., IPU dan Dr. Syahidah, S.Hut, M.Si, atas semua masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam kesempurnaan penulisan tesis ini.
3. Pimpinan dan Staf Balai TN Taka Bonerate atas bantuannya dalam pelaksanaan penelitian.
4. Pimpinan dan Staf akademik Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam kelengkapan administrasi selama perkuliahan hingga pelaksanaan seminar dan ujian.
5. Kepada orang tua tercinta, saya mengucapkan terima kasih atas doanya, selama saya menempuh pendidikan.
6. Penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada isteri tercinta atas motivasi dan dukungan yang tak ternilai.
7. Ucapan terima kasih kepada *Enumerator* dan semua yang terlibat membantu pelaksanaan penelitian.

Semoga penelitian dan tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kehutanan di Indonesia.

Makassar, 20 Februari 2024

Yasri Tahir

ABSTRAK

YASRI TAHIR, *Dinamika Visibilitas Konflik Pada Kawasan Konservasi Perairan Di Taman Nasional Taka Bonerate* (dibimbing Oleh Muhammad Alif K Sahide dan Asrianny)

Masalah utama pengelolaan Taman Nasional Takabonerate adalah praktek *destructive fishing* yang berdampak pada rusaknya ekosistem kawasan. Masalah ini disebabkan oleh tekanan ekonomi yang menyebabkan lemahnya posisi nelayan. Konflik di kawasan konservasi perlu dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan solusi yang tepat karena terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kesejahteraan masyarakat dan konservasi.

Pendekatan kajian dilakukan dengan pengukuran visibilitas konflik. Penelitian difokuskan pada visibilitas konflik yang terjadi antara pengelola (Balai TN Taka Bonerate) dengan komunitas nelayan Jinato dan Bonelambere. Penelitian ini berfokus pada kurun 2017 sampai 2022, mengkaji penanganan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor di TN Taka Bonerate. Peneliti melakukan pengamatan terlibat dengan menggunakan pengalaman peneliti bekerja di Balai TN Taka Bonerate selama 11 tahun. Dari sana peneliti mengetahui latar belakang konflik, sejarah dan institusi masyarakat yang terlibat. Untuk mendapatkan informasi yang terperinci tentang bagaimana konflik berlangsung, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan 12 orang yang terdiri dari Balai TN Taka Bonerate, masyarakat nelayan Jinato dan Bonelambere. Analisis data menggunakan analisis konflik yang berbasis aktor dan relasi kuasanya.

Penelitian ini menemukan bahwa konflik komunitas Bonelambere masih terus terbuka (manifest) dengan memaksakan kehendak dalam menggunakan kompresor dan berkonflik horizontal dengan nelayan tradisional. Sementara itu, konflik pada komunitas Jinato telah mengalami deskalasi konflik (laten) dengan masyarakat telah menerima tawaran kemitraan konservasi dan meninggalkan aktivitas penggunaan kompresor.

Faktor-faktor yang menyebabkan konflik manifest di Bonelambere karena kesulitan untuk membuktikan praktek penangkapan mereka sebagai pelanggaran hukum, adanya dukungan orang kuat (patron), komunitas memiliki argumen bahwa mereka tidak menggunakan aktifitas destruktif. Sementara di Jinato sudah tercipta resolusi konflik dengan kombinasi antara penegakan hukum dengan kesediaan masyarakat menerima kemitraan konservasi yang menghadirkan solusi alternatif bagi penghidupan mereka.

Resolusi konflik yang di sarankan untuk nelayan Bonelambere adalah kemitraan konservasi dengan dengan model usaha perikanan tangkap. Sedangkan model resolusi konflik nelayan Jinato adalah peningkatan kapasitas kelompok Sumber Reseki. Untuk proses *yustisi*, disarankan pengelola Taka Bonerate menggunakan saksi ahli sebagai bukti tambahan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka yang digunakan masih perlu dilengkapi dengan alat analisis baru misalnya dengan memasukkan elemen pasar, kekuasaan struktural. Perlu menambahkan kerangka baru menganalisis kasus dimana tercipta akomodasi antara aktor-aktor yang terlibat konflik.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlu analisis keberlanjutan sumber daya perikanan akibat penggunaan alat bantu kompresor sebagai bahan resolusi konflik.

Kata Kunci : Destructive fishing, kuasa, aktor, kompresor, Taka Bonerate

ABSTRACT

YASRI TAHIR. *Dynamics of Conflict Visibility in the Conservation Area of Taka Bonerate National Park* (supervised by Muhammad Alif K Sahide and Asrianny)

The primary challenge in managing Taka Bonerate National Park is the practice of destructive fishing, leading to the ecosystem degradation. This issue arises from economic pressures, resulting in the vulnerability of fishers. A comprehensive examination of conflicts within the conservation area is crucial to address conflicting interests between community welfare and conservation objectives.

The study employs a conflict visibility measurement approach, focusing on conflicts between the management (Taka Bonerate National Park Office) and the fishing communities of Jinato and Bonelambere. It examines the handling of fishing gear, particularly compressors, in Taka Bonerate National Park from 2017 to 2022. Leveraging 11 years of experience at the park office, the researcher employed participant observation to understand the conflict's background, history, and involved community institutions. Detailed insights into the conflict dynamics were obtained through in-depth interviews with 12 individuals from the Taka Bonerate National Park Office and the Jinato and Bonelambere fishing communities. Data analysis utilized actor-based conflict analysis and power relations.

The study reveals that the conflict within the Bonelambere community remains overt, characterized by the imposition of will in compressor usage and horizontal conflicts with traditional fishermen. In contrast, conflict within the Jinato community has de-escalated, with the community accepting conservation partnership offers and abandoning compressor use.

The study reveals that conflicts within the Bonelambere community remain overt, driven by difficulties in proving fishing practices as illegal, influential patrons' support, and arguments of non-destructive activities. In contrast, conflicts within the Jinato community have de-escalated due to law enforcement and acceptance of conservation partnerships, leading to alternative livelihood solutions.

Recommended conflict resolutions include adopting a capture fisheries business model for Bonelambere fishermen and enhancing the capacity of Resource Source groups for Jinato fishermen. Additionally, the Taka Bonerate National Park management is advised to utilize expert witnesses for judicial processes.

The study underscores the importance of integrating new analytical tools, such as market elements and structural power, into existing frameworks for analyzing conflicts and developing new frameworks for cases of accommodation between conflicting actors.

Research recommendations emphasize the analysis of fisheries resource sustainability in conflict resolution measures involving compressor use

Keywords : Destructive fishing, power, actors, compressor, Taka Bonerate

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Konflik.....	5
2.2 Visibilitas Konflik.....	6
2.3 Konflik Laten.....	7
2.4 Konflik Manifest.....	7
2.5 Konflik di Taman Nasional.....	8
2.6 Alat Bantu Penangkapan Ikan Berupa Kompresor.....	9
2.7 Menyandingkan aktor yang kuat dan lemah dalam konflik.....	10
2.8 Konteks kekuatan ruang dan Intervensi dalam konflik.....	12
2.9 Aksi dan reaksi aktor: Politik instrumen kebijakan dengan gerakan akar rumput.....	12
2.10 Zonasi dan Solusi: Taman Nasional Taka Bonerate.....	13
2.10.1 Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate.....	13
2.10.2 Kemitraan Konservasi dan Program Pemberdayaan Masyarakat sebagai solusi.....	15
2.10.3 Pelibatan Masyarakat (Pengamanan swakarsa).....	16
2.10.4 Hubungan Patron – Klien.....	16
2.11 Kerangka Pikir.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	19
3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian.....	19
3.3 Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data.....	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Hasil.....	26
4.1.1 Deskripsi lokus konflik komunitas Bonelambere dan komunitas Jinato.....	26
4.1.2 Visibilitas konflik yang terjadi di TN Taka Bonerate laten atau manifest. ...	26
4.1.2 Menganalisis kontribusi penanganan konflik terhadap resolusi konflik yang permanen di Taman Nasional Taka Bonerate.....	41
4.2 Pembahasan.....	44
4.2.1 Visibilitas konflik yang terjadi di TN Taka Bonerate laten atau manifest. ...	44
4.2.2 Menganalisis kontribusi penanganan konflik terhadap resolusi konflik yang permanen di Taman Nasional Taka Bonerate.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbedaan antara konflik laten dan konflik nyata: Visibilitas Konflik dengan Aktor dalam Pikiran (AcCV)	21
Tabel 2.	Perbandingan singkat karakteristik komunitas Bonelambere dan Jinato	28
Tabel 3.	Titik gradasi konflik laten dan manifes berdasarkan Actor centered Conflict Visibility (AcCV)	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta lokus konflik penggunaan kompresor di TN Taka Bonerate	29
Gambar 2. Kompresor beserta kelengkapannya	37
Gambar 3. Histogram konflik penanganan kompresor di TN Taka Bonerate	39
Gambar 4. Jumlah gangguan penggunaan kompresor tahun 2017 - 2022	40
Gambar 5. Peta gangguan kawasan di TN Taka Bonerate Tahun 2017 - 2022	41
Gambar 6. Jenis-jenis gangguan kawasan di TN Taka Bonerate 2017-2022	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta lokasi penelitian, domisili komunitas dan lokasi gangguan kompresor	51
Lampiran 2. Dokumentasi wawancara Pengelola TN Taka Bonerate.....	52
Lampiran 3. Dokumentasi wawancara komunitas Bonelambere dan Jinato	53
Lampiran 4. Kompresor, aksi demonstrasi dan aksi penolakan nelayan tradisional	54
Lampiran 5. Undangan rapat di DPRD membahas aspirasi komunitas Bonelambere	55
Lampiran 6. Aspirasi penolakan masyarakat Pasitallu Timur(nelayan dalam kawasan) tentang penggunaan kompresor tanggal 26 Oktober 2021.	56
Lampiran 7. Piagam Pa'jukukang tentang pemberantasan <i>Illegal fishing</i> dan <i>Destructive Fishing</i>	57
Lampiran 8. Hasil Wawancara 1, komunitas Bonelambere	58
Lampiran 9. Hasil Wawancara 2, komunitas Bonelambere	60
Lampiran 10 Hasil Wawancara 3, komunitas Bonelambere	62
Lampiran 11 Hasil Wawancara 4, komunitas Bonelambere	63
Lampiran 12 Hasil Wawancara 5, komunitas Bonelambere	64
Lampiran 13 Hasil Wawancara 6, komunitas Jinato	65
Lampiran 14 Hasil Wawancara 7, pengelola	67
Lampiran 15 Hasil Wawancara 8, pengelola	72
Lampiran 16 Hasil Wawancara 9, pengelola	75
Lampiran 17 Hasil Wawancara 10, pengelola	78
Lampiran 18 Hasil Wawancara 11, pengelola	81
Lampiran 19 Hasil Wawancara 12, pengelola	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan konservasi di Indonesia meliputi kawasan konservasi daratan dan laut secara keseluruhan memiliki luasan 27.048.933,11 Ha dan tersebar di seluruh pulau (Kementerian LHK, 2020) yang dikelola oleh negara. Konflik pengelolaan kawasan konservasi masih dirasakan menjadi salah satu persoalan utama dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Rooy ERD *et al* (2021) mengemukakan bahwa konflik kawasan konservasi antara lain disebabkan oleh adanya tumpang tindih kepentingan atas tanah pada kawasan konservasi, belum adanya harmonisasi peraturan mengenai tanah-tanah masyarakat di atas kawasan konservasi yang peruntukan dan penggunaannya diatur oleh Negara untuk kepentingan umum serta pemerintah daerah yang belum mengatur secara spesifik terkait pengaturan hak atas tanah di dalam kawasan konservasi.

Konflik pengelolaan kawasan konservasi hingga 10 tahun terakhir masih terjadi hampir di seluruh kawasan di Indonesia. Konflik antara pengelola dengan nelayan dan pemerintah daerah di Taman Nasional Teluk Cendrawasih (Sembiring *et al.*, 2010). Konflik di Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu terjadi antara pengelola dan masyarakat, antara pengelola dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat lainnya (TNI) dalam kawasan (Senoaji *et al.*, 2020). Konflik antara masyarakat dengan pengelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak karena perubahan zonasi (Marina *et al.*, 2011). Konflik agraria yang terjadi antara pengungsi Aceh dengan pihak pengelola Balai Besar-TNGL (Doni & Suraya, 2021). Konflik di Taman Nasional Bunaken antara masyarakat desa selaku pihak yang menguasai serta memanfaatkan lahan kawasan TN Bunaken serta PTB Kawasan Hutan Kabupaten Minahasa Utara selaku penyelenggara penataan batas (Aneng *et al.*, 2021). Konflik di kawasan konservasi taman nasional Rawa Aopa terjadi antara pengelola dan

kelompok masyarakat (Syaf et al., 2022). Konflik lahan dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo dalam pemanfaatan sumberdaya alam antara masyarakat setempat dengan pengelola (Setiawan, 2022). Dari beberapa konflik yang terjadi, diketahui penyebab konflik diantaranya adalah karena perbedaan interpretasi, perbedaan kepentingan, serta perbedaan sistem tenur formal yang ditawarkan pengelola konservasi dengan sistem tenur informal yang dimiliki oleh masyarakat.

Data Ditjen KSDAE (2020) menyebutkan bahwa kawasan konservasi perairan di Indonesia yang dikelola oleh Negara seluas 5,32 juta Ha. Konflik penggunaan alat bantu penangkapan hasil laut dengan menggunakan kompresor di TN Taka Bonerate belum mendapatkan perhatian secara mendalam di literatur yang ada. Beberapa penelitian dan publikasi dalam kurun waktu 2012 – 2021 masih terkait dengan potensi sumber daya alam, potensi wisata, biofisik dan sosial budaya di taman nasional laut.

Taman Nasional Takabonerate sebagai salah satu taman nasional laut yang masuk ke dalam zonasi cagar biosfer sejak tahun 2015 (Kementerian LHK, 2020) memiliki luas total 530.765 Ha yang terdiri atas zona inti, pemanfaatan, perlindungan bahari, tradisional, rehabilitasi, religi budaya sejarah dan zona khusus. Masalah utama pengelolaan Taman Nasional Takabonerate adalah *illegal fishing*. TN Taka Bonerate (2018) mencatat jumlah kejadian *illegal fishing* pada rentang waktu 2017 hingga 2018 mencapai 68 kasus dengan kasus terbanyak adalah *destructive fishing* dengan kompresor dan bom. Praktek *destructive fishing* kemudian menyebabkan lemahnya posisi nelayan dan karena tekanan ekonomi akan terus melakukan praktek tersebut yang akan berdampak pada kerusakan ekosistem kawasan Taman nasional Takabonerate (Asri et al., 2019).

Terjadinya kegiatan *destructive fishing* yang berulang dan dalam jangka waktu yang lama selanjutnya akan menyebabkan munculnya konflik berkelanjutan. Menurut (Mardiyanto A, 2015), konflik di kawasan konservasi perlu mendapat solusi yang tepat karena terdapat dua kepentingan berbeda yaitu kesejahteraan untuk masyarakat dan konservasi untuk pengelola.

Beberapa hal yang telah dilakukan sebagai resolusi konflik di TN Takabonerate adalah sosialisasi pengelolaan ke masyarakat dan patroli pengamanan (Taka Bonerate, 2018) serta pembentukan sembilan kelompok kemitraan konservasi (Ditjen KSDAE, 2020). Data tahun 2019 tercatat masih terjadi *destructive fishing*. Oleh karenanya perlu pengkajian terkait konflik dan resolusi yang telah ada sebelumnya. Pendekatan kajian konflik dapat dilakukan dengan pengukuran visibilitas konflik. Visibilitas konflik didefinisikan sebagai gambaran para aktor yang terlibat dalam konflik. Pengukuran visibilitas konflik oleh (Yusran et al., 2017), menggunakan tiga dimensi yaitu 1) definisi konflik (substansi); 2) penyelesaian konflik (aspek peraturan); dan 3) visibilitas wacana individu seputar konflik. Metode ini kemudian dikembangkan oleh (Sahide et al., 2021) dengan mengukur tingkat konflik laten dan konflik manifest menggunakan kerangka yang berpusat pada aktor. Pendekatan heuristik ini berfokus pada gradasi interaksi antara aktor-aktor yang berkonflik dengan menyandingkan aktor negara dan komunitas lokal dalam melindungi kepentingannya.

Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengelolaan kawasan konservasi laut khususnya di Taman Nasional Taka Bonerate. Melalui penelitian ini akan diidentifikasi penampakan konflik, peran para aktor dalam konflik melalui pendekatan visibilitas konflik serta kontribusi penanganan konflik di Taman Nasional Taka Bonerate. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Sahide *et al.*, 2021 meliputi : aktor yang terlibat dalam konflik; peran aktor lokal dalam menginternalisasi masalah dan kepentingan mereka untuk mendapatkan perhatian publik serta peran aktor Negara dalam menyebarkan instrumen kebijakan, memobilisasi sumber daya dan intervensi. Hasil identifikasi dan analisis selanjutnya diharapkan menjadi bahan kajian resolusi konflik di kawasan konservasi laut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana visibilitas konflik yang terjadi di Taman Nasional Taka Bonerate?
2. Bagaimana refleksi penanganan konflik berkontribusi terhadap resolusi konflik yang permanen di Taman Nasional Taka Bonerate?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Menganalisis visibilitas konflik yang terjadi di Taman Nasional Taka Bonerate laten atau manifest.
2. Menganalisis kontribusi penanganan konflik terhadap resolusi konflik yang permanen di Taman Nasional Taka Bonerate.

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan informasi yang mendalam tentang penanganan konflik di Taman Nasional Taka Bonerate sebagai bahan kajian resolusi konflik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konflik

Konflik berasal dari kata *confligere, conflictum* (saling berbenturan) yaitu semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi antagonis yang bertentangan (Kusworo, 2019). Konflik adalah: “proses pertentangan yang diekspresikan di antara pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik” (Wirawan, 2009). Manajemen konflik adalah proses mengembangkan strategi konflik sebagai rencana untuk mengelola konflik. Jika dibiarkan, konflik dapat berubah menjadi destruktif, di mana masing-masing pihak akan memfokuskan energi, pemikiran, dan sumber daya organisasinya bukan untuk meningkatkan produktivitas, tetapi untuk menciptakan Kerusakan dan menghancurkan lawan konflik. Ini berarti akan merusak potensi produktivitas mereka. Akibatnya, kinerja mereka akan menurun, yang akan menurunkan produktivitas sistem sosial. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, manajemen konflik adalah kegiatan untuk mengontrol dan mengubah konflik untuk menghasilkan konflik yang menguntungkan(atau setidaknya tidak berbahaya) Untuk pihak ketiga, manajemen konflik adalah upaya untuk mengarahkan konflik dari konflik destruktif menjadi konflik konstruktif (Kusworo, 2019).

Dari segi dinamika, konflik dapat berupa konflik tertutup (laten), mencuat (*emerging*) dan terbuka (manifest) seperti yang diungkapkan oleh (Fuad & Maskanah, 2000). Selain itu, Fuad dan Maskanah (2000) juga membagi konflik menjadi dua jenis menurut level permasalahannya, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik yang muncul dalam konflik sumber daya alam dapat bersifat tertutup, mencuat atau terbuka, tergantung pada karakteristik aktor yang bersaing. Tergantung pada tingkat masalahnya, konflik sumber daya

alam biasanya merupakan konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat (Marina et al., 2011).

Konflik dapat dikelola melalui tiga dasar penyelesaian (Condliffe, 1991 sebagaimana dikutip (Marina et al., 2011), yakni (1) langsung antara para pihak yang bersengketa (*one-to-one*), dimana masing-masing pihak yang berselisih bertindak untuk menyelesaikan sendiri masalahnya; (2) perwakilan pihak lain (*representation*) ketika para pihak yang bersengketa diwakili oleh pihak lain seperti advokat, rekan kerja dan asosiasi pejabat; dan (3) melibatkan pihak ketiga atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan atau hak salah satu pihak yang bersengketa.

2.2 Visibilitas Konflik

Visibilitas artinya keadaan dapat dilihat dan diamati, kejelasan. Sedangkan visibilitas konflik dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melihat dengan jelas konflik yang terjadi (penampakan konflik) (Sahide et al., 2021) Pengelolaan konflik baik oleh internal maupun oleh para ahli dari luar, masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan dengan penyelesaian konflik, pertama-tama harus ditentukan tingkat dampak/pengaruh dan siapa yang paling cocok untuk mengelola konflik tersebut (Kusworo, 2019). Visibilitas konflik dapat digunakan untuk mendefinisikan konflik laten atau manifest, termasuk dalam konflik manifest ketika visibilitas ada (perumusan kebijakan atau penegakan hukum) dan termasuk dalam konflik laten ketika visibilitas tidak ada (Yusran et al., 2017). Dengan melihat lebih jelas konflik yang terjadi maka konflik dapat dikelola menjadi konflik yang positif. Dengan hasil analisa visibilitas konflik diharapkan para mediator dapat mengelola atau menjadikan konflik yang konstruktif bukan destruktif. Sehingga dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi, pemangku kepentingan terlibat dalam konflik untuk menciptakan win-win solution atau resolusi konflik.

2.3 Konflik Laten

Laten artinya terpendam, tersembunyi, belum kelihatan. Kondisi yang tidak kondusif dan tidak sesuai dengan harapan maupun tujuannya akan bermuara pada konflik yang dinamakan dengan konflik terpendam (Kusworo, 2019). Sahide et al (2021) menyederhanakan istilah "konflik laten" dengan mengatakan bahwa ada persaingan (berjuang untuk sumber daya yang sama) tetapi aktor yang relevan atau masyarakat umum tidak mengetahui perselisihan tersebut. Adanya kesenjangan antara harapan yang begitu besar namun tidak sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada dapat memunculkan konflik. Individu maupun kelompok yang ada pada suatu organisasi selalu memiliki harapan/keinginan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, namun dalam kenyataan yang ada di lapangan keberadaan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi yang diharapkan dan diinginkan tersebut jumlahnya sangat terbatas alias langka. Untuk itu, maka masing-masing individu maupun kelompok selalu berjuang habis-habisan untuk memperebutkan/memperolehnya. Perbedaan keinginan, kemampuan, kekuasaan tersebut menyediakan dasar-dasar dan benih-benih untuk memunculkan ketidaksepahaman/sependapat yang lambat laun akan bermuara pada terjadinya konflik. Pada umumnya konflik terpendam sulit untuk dideteksi karena secara nyata memang belum kelihatan (Kusworo, 2019).

2.4 Konflik Manifest

Manifest artinya nyata, terang, jelas. Perkembangan demi perkembangan konflik yang terjadi dalam suatu lingkungan haruslah memperoleh penanganan yang serius dan secepatnya. Kalau hal yang demikian diabaikan maka sudah dapat dipastikan bahwa konflik secara nyata dapat dengan mudah segera mewujudkan bentuknya. Konfrontasi secara terbuka dapat terjadi. Konflik secara nyata sewaktu-waktu dapat meledak dan hal tersebut dapat disaksikan oleh siapa saja (umum), baik kelompok yang terlibat konflik maupun mereka yang tidak terlibat dalam konflik. Pada titik ini, masing-masing pihak berkonflik selalu menunjukkan kemampuannya untuk mengintimidasi, bahkan serangan

terhadap kelompok lawan. segala cara dilakukan untuk melemahkan, melumpuhkan dan mengalahkan lawan dengan cara apapun dan dalam waktu singkat (Kusworo, 2019).

2.5 Konflik di Taman Nasional

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (Pemerintah RI, 1990). Taman Nasional Taka Bonerate merupakan taman nasional laut, dimana wilayahnya adalah sebagian besar lautan yang terletak di laut flores. Kawasan Taka Bonerate berawal dari ditetapkannya sebagai cagar alam laut pada tahun 1989. Kemudian berubah fungsi sebagai Taman Nasional Taka Bonerate pada tahun 1992. Setelah itu diperkuat dengan ditetapkannya sebagai Taman Nasional Taka Bonerate pada tahun 2001 seluas 530.765 Ha.

Beberapa faktor yang mendukung maraknya praktek penangkapan ikan yang merusak di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate adalah lemahnya pengawasan, masih adanya konflik yurisdiksi antar otoritas kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, dan konflik antar nelayan, ketersediaan bahan baku bom dan obat bius, kuatnya posisi pengekangan dan lemahnya posisi sawi dalam hubungan patron klien antara punggawa-sawi, dan tersedianya pasar perikanan yang menggunakan bahan kimia (sianida) dan bahan peledak (Asri et al., 2019).

Pembagian nelayan di kawasan TN Taka Bonerate dibedakan berdasarkan cara penangkapan ikan, alat penangkapan ikan dan daerah asal nelayan. Berdasarkan cara tangkap dibagi menjadi dua kelompok yakni nelayan ramah lingkungan dan nelayan destruktif. Kemudian berdasarkan asal nelayan dibagi lagi menjadi nelayan pendatang dan nelayan lokal. Jika dilihat berdasarkan suku, maka nelayan di TN Taka Bonerate didominasi oleh suku Bugis dan suku Bajo. Ragam jenis dan kategori nelayan tersebut menimbulkan gesekan dan persoalan sosial yang berujung pada konflik (Asri et al., 2019)

Konflik yang terjadi di Taman Nasional (TN) Bantimurung Bulusaraung adalah konflik terkait dengan tata batas kawasan dan konflik yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di dalam kawasan (Kadir W et al., 2013). Konflik di Taman Nasional Leuser disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mengizinkan perusahaan membangun habitat dengan menebang pohon. Penyebab konflik di Taman Nasional Kutai adalah adanya tambang batu bara yang ingin dikuasai masyarakat. Kawasan hutan konservasi di wilayah daratan dengan luas 22,8 juta hektar, sekitar 2,7 juta hektar telah dirambah, sangat terdegradasi atau diubah tujuannya dan sulit untuk pulihkan. Jenis konflik di setiap taman nasional berbeda dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula (Purwawangsa, 2018).

2.6 Alat Bantu Penangkapan Ikan Berupa Kompresor

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompresor (Pemerintah RI, 2009).

Penggunaan kompresor tambal ban cukup berbahaya bagi kesehatan nelayan dikarenakan di dalam kompresor tambal ban tidak terdapat filter penyaringan udara serta menggunakan oli sintetis yang berasal dari minyak bumi sebagai pelumas kompresornya. Penggunaan kompresor ban untuk menyelam tidak memberikan batas waktu bagi nelayan ketika menyelam di dalam air, karena udara di pasok terus dari permukaan air sehingga dapat mengakibatkan dekompresi akut, bahkan sampai kematian bagi nelayan penggunaannya. Penggunaan kompresor dapat merusak sumber daya ikan dan ekosistem

terumbu karang dan juga menjadi sumber konflik bagi nelayan tradisional lainnya (Affan et al., 2022).

Konsep pengelolaan berbasis masyarakat dan pengelolaan bersama masih terbatas pada pengelolaan kawasan konservasi dan habitat terumbu karang. Kesenjangan dan perbedaan muncul di antara kawasan konservasi karena kurangnya pemahaman bersama tentang tujuan pengelolaan, yang seringkali mengakibatkan kegiatan penangkapan ikan sebagai bagian dari kebutuhan ekonomi bertentangan dengan fungsi kawasan konservasi dalam jangka panjang (Atmaja & Nugroho, 2017).

2.7 Menyandingkan aktor yang kuat dan lemah dalam konflik

Konflik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan konservasi tetap sama selama empat puluh tahun tetapi peraturan dan visibilitas yang berubah. Taman nasional tidak memberikan resolusi akhir, tetapi mendukung kedua kepentingan yang saling bertentangan. Kebijakan untuk menegakkan peraturan formal yang ada, tidak mengubah implementasi dan visibilitas, sebaliknya kebijakan untuk menegakkan peraturan formal baru memicu visibilitas konflik yang lebih besar (Yusran et al., 2017).

Metode pengukuran visibilitas konflik ini memperhitungkan bahwa konflik bertahan lama, "menyeberang berulang kali ke dan keluar dari kekerasan," dan asimetris, melibatkan pihak-pihak dengan tingkat kekuasaan dan status yang berbeda (Miall, 2004). Metodologi berarti memberikan evaluasi hipotesis namun cukup cepat tentang bagaimana bentrokan bergerak sepanjang kontinum keadaan diam dan nyata, bagaimana keterbukaan ini mencirikan tugas menyampaikan strategi dalam pertentangan, dan membedakan hasil mediasi.

Yusran dkk (2017) hanya menyajikan konflik laten dan manifes dalam kerangka tiga dimensi (seperti substansial, regulasi, dan empiris), tanpa gradasi spesifik antara keduanya. dengan metode pengukuran visibilitas konflik, peneliti dapat menangani persepsi kedalaman pertentangan, dengan lebih fokus pada seluk-beluk bagaimana aktor menjawab pertengkaran dan

levelnya. di mana mereka mendapatkan atau kehilangan situasi dan kepentingan mereka.

Dengan menggunakan pembedaan yang berpusat pada aktor, strategi ini memiliki potensi untuk memberikan intervensi yang tepat dalam sengketa kompleks yang mengungkap konflik laten dan manifes, yang dapat berulang dalam konflik sumber daya alam. Ini akan membutuhkan jangka waktu yang lebih lama; Namun, para aktor yang terlibat akan mendapat manfaat dari framing visibilitas karena akan memungkinkan mereka untuk melihat waktu yang lebih luas periode perselisihan Joshi (2014) dan, sebagai hasilnya, para aktor akan mendapat manfaat dari kesadaran akan keadaan konflik.

Fokus utama perselisihan adalah pada para aktor dan prioritas mereka. Konflik dapat bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai variabel, seperti kebijakan nasional, penegakan hukum, kebuntuan kebijakan, tingkat partisipasi masyarakat lokal, dan kepentingan yang diperebutkan dan kompleks di antara para aktor (Speakman & Ryals, 2010). Namun, dengan memanfaatkan framing kepentingan-aktor ini dan mempertimbangkan sifat konflik yang asimetris, Peneliti membuat penyederhanaan heuristik dengan hanya menyandingkan dua jenis aktor, seperti antara aktor-aktor di pemerintahan dan aktor-aktor di masyarakat lokal. Ini dilakukan dengan menyandingkan saja.

Tipe A: Pelaku yang bertanggung jawab, mengendalikan, atau bertanggung jawab. Penyediaan instrumen kebijakan, seperti penerbitan kebijakan baru atau penegakan kebijakan yang sudah ada, biasanya berada di bawah lingkup pelaku yang memiliki otoritas (seperti pemerintah). departemen atau perusahaan swasta yang menguasai tanah).

Tipe B: aktor yang tidak berdaya seringkali merupakan masyarakat kecil yang telah kehilangan kontrol informasional, institusional, dan kesamaan atas tanah dan sekarang menjadi target intervensi kebijakan, mengorbankan kebutuhannya yang paling mendasar.

Aktor A dan B mungkin dapat melihat perbedaan dalam posisi dan kepentingan mereka dalam mode yang tidak terlihat ini, tetapi wacana tersebut juga tidak dicermati oleh publik. Sebaliknya, konflik yang nyata menunjukkan bahwa hal itu secara efektif menarik perhatian publik dan bahkan memungkinkan pihak luar untuk terlibat secara langsung.

2.8 Konteks kekuatan ruang dan Intervensi dalam konflik

Dalam pemerintahan yang tiran, otoritas publik sebenarnya akan mengirimkan pendekatan yang bertentangan dengan kepentingan penduduk sekitar. Konflik masih mungkin terlihat, tetapi strategi militeristik dan kurangnya liputan media independen akan menyembunyikannya dari publik. Dalam hal ini, tidak ada konfrontasi karena tidak ada mediasi dan penduduk lokal tidak memiliki sarana atau kekuatan untuk menantang pemerintah. Pengaturan ini disebut oleh (Gaventa, 2006) sebagai "ruang tertutup", di mana organisasi otoriter mencegah partisipasi.

2.9 Aksi dan reaksi aktor: Politik instrumen kebijakan dengan gerakan akar rumput

Peneliti akan mengamati bagaimana kedua aktor memberi ruang untuk bertindak dan bagaimana aktor lain bereaksi, menghasilkan perbedaan kualitatif antara konflik manifes dan konflik laten. Visibilitas dari konflik sumber daya alam sangat dibantu oleh Aktor A. Pembuatan kebijakan dapat mengendalikan perselisihan dan mencakup berbagai opsi penyelesaian (misalnya, perumusan kebijakan, penegakan kebijakan, menawarkan pengelolaan bersama) untuk lembaga yang bertanggung jawab atas sumber daya alam. Kebijakan itu sendiri dapat berupa sumber ketidaksepakatan dengan cara tertentu. Untuk menjaga agar konflik tetap membara, aktor A dapat memberlakukan peraturan kosong atau memecah belah aktor B (kepentingan bersama).

Sahide et al. (2009) menyatakan bahwa sebuah kebijakan kosong membebaskan ruang untuk agenda kebijakan sambil mendelegasikan tanggung jawab kepada agensi untuk secara aktif mengimplementasikan janji-

janji tersebut. Aktor B memiliki beberapa pilihan sesuai dengan kapasitas mereka untuk menangani masalah utama yang membuat perjuangan. Mereka mungkin mulai menyebarluaskan isu untuk menginternalisasi kepentingan bersama dan selanjutnya mengembangkan aliansi dengan aktor-aktor terkait di luar aktor-aktor yang terkena dampak langsung konflik. Setelah itu, mereka mungkin dapat mengadvokasi dan/atau mengklaim kembali kepentingan sumber daya alam lokal. Advokasi hukum mungkin termasuk atau tidak termasuk dalam hal ini.

2.10 Zonasi dan Solusi: Taman Nasional Taka Bonerate

2.10.1 Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate

Taman Nasional dikelola dengan sistem zona. Khusus Taman Nasional Taka Bonerate dikelola dengan beberapa zona yaitu Zona Inti 10.046 ha (1,9%), Zona Perlindungan Bahari 25.875 ha (4,9%), Zona Pemanfaatan 9.491 ha (1,8%), Zona Tradisional 481.334 ha (90,7%) Zona Khusus 270 ha (0,1 %), Zona Rehabilitasi 472 ha (0,1%), Zona Religi, Budaya dan Sejarah 3.279 ha (0,6%) (Taka Bonerate, 2018). Zona pemanfaatan terbagi atas 4 peruntukan yaitu zona yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam kawasan, zona yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar kawasan, zona yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan zona yang diperuntukkan bagi aktivitas wisata.

1. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona inti meliputi:

- a. Perlindungan dan pengamanan;
- b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- c. Penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau penunjang budidaya;
- d. Dapat dibangun sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan.

2. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona rimba meliputi:

- a. Perlindungan dan pengamanan;
- b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam, hayati dengan ekosistemnya;

- c. Pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya;
 - d. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi hidupan liar;
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas.
3. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona pemanfaatan meliputi:
- a. Perlindungan dan pengamanan;
 - b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 - c. Penelitian dan pengembangan pendidikan, dan penunjang budidaya;
 - d. Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam;
 - e. Pembinaan habitat dan populasi;
 - f. Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan;
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa Lingkungan.
4. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona tradisional meliputi:
- a. Perlindungan dan pengamanan;
 - b. Inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - c. Pembinaan habitat dan populasi;
 - d. Penelitian dan pengembangan;
 - e. Pemanfaatan potensi dan kondisi sumberdaya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
5. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona khusus meliputi:
- a. Perlindungan dan pengamanan;
 - b. Pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat dan;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Monitoring populasi dan aktivitas masyarakat serta daya dukung wilayah. (P. M. Kehutanan, 2006).

2.10.2 Kemitraan Konservasi dan Program Pemberdayaan Masyarakat sebagai solusi

Kemitraan kehutanan di dalam kawasan konservasi yang selanjutnya disebut kemitraan konservasi adalah kerjasama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan. Bentuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat berupa pemberian akses dan kerjasama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat. Lokasi kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat meliputi zona/blok tradisional dan blok pemanfaatan KPA, dengan mempertimbangkan aksesibilitas, tingkat kesejahteraan masyarakat dan potensi sumberdaya hutan non kayu yang tidak dilindungi (K. L. H. dan Kehutanan, 2018).

Kawasan konservasi Indonesia dikelilingi kurang lebih 6.381 desa yang menggantungkan kehidupannya kepada kawasan konservasi. Akibatnya terjadi konflik antara masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan penghidupan dari kawasan konservasi, kemudian di sisi yang lain, pengelola kawasan konservasi memiliki mandat untuk menjaga keutuhan, keaslian, dan kelestarian kawasan konservasi. Dalam situasi konflik kepentingan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan kemitraan konservasi (Prayitno, 2020). Masyarakat diposisikan sebagai subjek pengelolaan kawasan konservasi (Wiratno, 2018).

Perlindungan Taman Nasional Gunung Merapi melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengembangan dan pemberdayaannya di sektor wisata. Seluruh kegiatan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional, masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemantauan dan evaluasi (Susandi et al., 2021). Masyarakat lokal yang merasakan manfaat

dari pariwisata di Taman Nasional, masyarakat akan melindungi asetnya dan dapat menginvestasikan lebih banyak sumber daya di dalamnya serta cenderung tidak akan merusak alamnya (Goodwin, 2002).

2.10.3 Pelibatan Masyarakat (Pengamanan swakarsa)

Pelibatan masyarakat dengan cara pengamanan swakarsa dilakukan melalui perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang diharapkan di kawasan TN Takabonerate salah satunya adalah mulai terlibatnya masyarakat secara aktif dalam monitoring pengawasan. Strategi yang digunakan adalah membangun kepercayaan/mendapatkan kepercayaan masyarakat, memberikan kepercayaan kepada kelompok, melibatkan khalayak target/volunteer serta menjalin kemitraan dengan mitra lain (Pranajaya, 2017).

Perlindungan dan pengamanan hutan berdasarkan peran serta masyarakat setempat merupakan upaya menjaga dan melindungi kawasan hutan dari berbagai gangguan. Pelaksanaan pengamanan pada kawasan konservasi dengan pelibatan masyarakat didasarkan pada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak hanya dilakukan oleh polisi hutan, tetapi juga dengan partisipasi masyarakat sebagai objeknya. Masyarakat mitra Polhut atau biasa disebut MMP adalah kelompok masyarakat disekitar kawasan hutan yang membantu tugas Polisi Kehutanan dibawah koordinasi, pembinaan dan pengawasan instansi Pembina (Sukarman, 2018).

2.10.4 Hubungan Patron – Klien

Hubungan patron klien yang kuat di nelayan kawasan Taman Nasional Taka Bonerate merupakan salah satu penyebab banyaknya kegiatan *destruktif fishing*. Pola hubungan ini dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, namun didominasi oleh pemilik modal produksi(punggawa) sebagai patron. Sedangkan nelayan sawi adalah anak buah kapal maupun juragan/nahkoda bertindak sebagai klien. Hubungan bisnis terjadi antara patron dan klien. Ikatan patron klien menguatkan posisi punggawa dalam mengendalikan sawi. Alat produksi, mesin tangkap, jaminan keamanan dan pinjaman dana diberikan oleh punggawa kepada

sawi. kemudian hasil tangkapan oleh sawi wajib dijual ke punggawa (Asri et al, 2009).

Fenomena hubungan sosial ekonomi patron-klien sangat berpengaruh di kehidupan nelayan. Hubungan patron-klien adalah hubungan yang tercipta setelah tercapainya kesepakatan antara patron dan klien, dimana klien menyanggupi bekerja kepada patron dengan menerima upah dan jaminan sosial dimana patron menyatakan kemampuannya mempekerjakan klien. Perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh patron sangat besar, patron memiliki modal yang besar sehingga bisa membuat klien terikat. Patron mendapatkan 65% hasil tangkapan dan klien mendapatkan 35% dari hasil tangkapan (Handoko et al., 2022).

2.11 Kerangka Pikir

